PERATURAN KEPALA DESA SUKAMAJU
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2021-2027

DESA SUKAMAJU
KECAMATAN ABUNG SEMULI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

**KEPALA DESA SUKAMAJU KECAMATAN ABUNG SEMULI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**PERATURAN DESA SUKAMAJU
NOMOR 02 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDESA) TAHUN 2021 – 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAMAJU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah Desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penyelenggara pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) ;
 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;

10. Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016 Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, tentang Kategori Setatus DESA Maju ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten LAMPUNG UTARA No.....Tahun....., tentan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Lampung Utarra Tahun 2021 – 2027 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 20..... tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa dan RKP-DESA ;
17. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor..... Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
18. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Setiap Desa ;
19. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun tentang Pengelolaan Aset DESA ;
20. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun tentang Tata Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Mengelola Sumber Daya Alam DESA ;
21. Keputusan Bupati LAMPUNG UTARA Nomor : / / KPTS / / tentang Pengangkatan Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Abun Semuli Kabupaten Lampung Utara ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMAJU
dan
KEPALA DESA SUKAMAJU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA NO 02 TAHUN 2022 MENGENAI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA)
TAHUN 2021 – 2027**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. DESA adalah Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.
2. DESA, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa ;

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
6. Perencanaan, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia ;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. ;
8. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ;
9. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN RPJMDESA

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJMDesa adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran aspirasi masyarakat guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMDesa untuk :

- a. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat ;

- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa ;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa ;
- d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa ;

BAB III

SISTEMATIKA RPJMDESA

Pasal 4

Sistematika RPJMDesa Tahun 2021 – 2027 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : PROFIL DESA
- BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJMDESA
- BAB IV : VISI dan MISI
- BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
- BAB VII : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- BAB VIII : KEBIJAKAN UMUM
- BAB IX : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- BAB X : PENUTUP

Pasal 5

RPJMDesa Tahun 2021 – 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukamaju.

Ditetapkan di : Sukamaju

Pada tanggal : 03.....Maret 2022

KEPALA DESA SUKAMAJU

H.EDI SUTRISNO.A.Md.,Kop

Diundangkan di : Sukamaju

Pada tanggal : 04.....Maret 2022

SEKRETARIS DESA SUKAMAJU

SUHADI

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUKAMAJU KECAMATAN ABUNG SEMULI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NOMOR : / KPTS.BPD / III / 2022

TENTANG

**KESEPAKATAN PERATURAN DESA
NO 02 TAHUN 2022
MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMDESA)
TAHUN 2021 - 2027**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMAJU

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan dalam skala Desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan Operasional BPD, Intensif RT/RW, Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa
- c. , penyelenggara pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukamaju Tahun 2021-2027;

- e. Bahwa sebelum peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJMDesa 2021-2027 antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah Desa Penyusunan RPJMDESA 2021-2027;
- f. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) ;
 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;
11. Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016 Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, tentang Kategori Setatus Desa Maju ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No..... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No..... Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Lampung Utara No Tahun, tentan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 20...-20... ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa ;

17. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
18. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor Tahun 20..... tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Setiap Desa ;
19. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor..... Tahun 20..... tentang Pengelolaan Aset Desa ;
20. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor..... Tahun 20..... tentang Tata Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Desa ;
21. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : / / KPTS / / tentang Pengangkatan Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara ;
22. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : / / KPTS / / tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** MEMBAHAS PERATURAN DESA NO 02 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN 2021 – 2027 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA :** MENYEPAKATI PERATURAN DESA NO 02 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN 2021 - 2027
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH
KEPALA DESA

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL
DITETAPKAN

Disepakati di : Sukamaju

Pada Tanggal : 08 Maret 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SUKAMAJU

KETUA

RIMANTO SLAMET.S.Pd.,MMPD

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah Desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPM, Kepala Dusun (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Sukamaju telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJMDesa. RPJMDesa adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Sukamaju yang menginginkan masa depan Desa Sukamaju yang lebih baik di segala bidang. Mimpi Desa Sukamaju akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi Desa Sukamaju dalam bentuk dokumen perencanaan Desa Sukamaju. Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDesa tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDesa ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDesa ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Sukamaju.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	3
D. MANFAAT	4
BAB II PROFIL DESA	
A. SEJARAH DESA	5
B. KONDISI DESA	6
C. SOTK DESA	17
D. MASALAH DAN POTENSI	18
BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM-DESA	
A. MUSYAWARAH DUSUN.....	21
B. MUSYAWARAH DESA	22
C. MUSRENBANG RPJM-DESA	22
BAB IV VISI DAN MISI	
A. VISI DESA	24
B. MISI DESA	25
BAB V TUJUAN DAN SASARAN	
A. TUJUAN DAN SASARAN	27
B. PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	28
BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	
A. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	32
B. PERMASALAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	41
C. STRATEGI PENCAPAIAN	42
BAB VII ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	
A. ARAH KEBIJAKANA KEUANGAN DESA	43

BAB VIII KEBIJAKAN UMUM

- A. TAHAPAN PERWUJUDAN MASYARAKAT SUKAMAJU YANG LEBIH SEJAHTERA 45
- B. TAHAPAN KELANJUTAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 45

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- A. PROGRAM PEMBANGUNAN 47
- B. PROGRAM PELAYANAN LAINNYA 57

BAB IX PENUTUP 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, Desa perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi Desanya dimasa yang akan datang, sehingga Desa tersebut bertambah maju. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaya yang dimiliki Desa saat ini maka Desa perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) atau langkah langkah yang perlu dilakukan selama 6 (tahun) tahun.

Sebagai bagian dari kesatuan wilayah Kabupaten, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) merupakan salah satu Dokumen pembangunan yang menjadi sasaran dari Pembangunan Kabupaten.

Desa Sukamaju merupakan salah satu Desa di Kabupaten Lampung Utara, maka dalam menyusun Perencanaan Pembangunan di Desa Sukamaju harus mengacu kepada kebijakan pembangunan yang ada di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Utara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sukamaju Tahun 2022 - 2028 ini bersifat komprehensif atau menyeluruh dan sinergi atau berkesinambungan dan saling keterkaitan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun yang memuat Visi, Misi, Kebijakan/Strategi, Pembidangan Program dan Kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa Sukamaju untuk satu tahunan.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

12. Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016 Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, tentang Kategori Setatus Desa Maju;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 06 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Lampung Utara No 07 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011 – 2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ... Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa;
16. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah sebagai pedoman bagi setiap Perangkat Desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan Pembangunan Desa.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta lebih untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Desa.

D. MANFAAT

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
- b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan pembangunan Desa.
- c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang di padukan dengan program pembangunan dari pemerintah.
- e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

PROFIL DESA

A. SEJARAH DESA

1. ASAL-USUL

Menurut cerita sesepuh atau orang yang dituakan di Desa Sukamaju Adalah sebuah Desa rintisan sebagai desa persiapan pada tahun 1970 dari Desa induk Kalibalangan, Desa Sukamaju merupakan daerah transmigrasi dengan harapan Hutan yang jadi bisa maju jadi Perkampungan, Desa, Perkotaan atau bahkan Kota karena adanya penduduk yang berbudaya tinggi. Pada awalnya Desa Sukamaju terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Sukamaju I, Dusun Sukamaju II, Dusun Sukamaju III.

Pada saat ini Desa Sukamaju mengalami pemekaran Dusun terdiri dari Tujuh (7) Dusun yaitu Sukaharjo, Sukamaju I, Sukamaju II, Sumberingin, Sukajadi, Sukamakmur, Sukarame serta Memiliki Jumlah Rt Sebanyak Tiga Puluh Lima (35) RT.

2. SEJARAH PEMERINTAHAN DESA/DESA

Sebagai Desa Tertua, Desa Sukamaju pernah dipimpin oleh beberapa Kepala Desa/Lurah dan saat ini disebut Kepala Desa antara lain :

➤	Tahun 1970 s/d 1975	KASTIYAR	(Definitif)
➤	Tahun 1975 s/d 1983	KASTIYAR	(Definitif)
➤	Tahun 1984 s/d 1991	KASRIYAR	(Definitif)
➤	Tahun 1992 s/d 2000	TUKIRIN	(Definitif)
➤	Tahun 2000 s/d 2005	SUMIAR. S.Pd	(Definitif)
➤	Tahun 2005 s/d 2012	WADIMAN	(Definitif)
➤	Tahun 2012 s/d 2013	AGUS SUPRIYANTO	(Pj)
➤	Tahun 2013 s/d 2019	SUMIAR S.Pd	(Definitif)
➤	Tahun 2019 s/d 2020	RIZAL JUANARA	(Pj)
➤	Tahun 2020 s/d 2021	SUBUR RASMANTO. SH.,MM	(Pj)

B. KONDISI DESA

1. Gambaran Umum Desa Sukamaju

Kondisi Desa Sukamaju pada umumnya berbeda dengan Desa-Desa yang lain yang ada di wilayah Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dengan Kategori Desa Berkembang dengan wilayah yang Luas dan letak wilayah Desa berada dekat dengan jalan negara. Dengan kategori Setatus Desa Berkembang menurut Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Secara umum Desa Sukamaju mengalami kemajuan dalam bidang Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dari hasil analisis kemajuan Desa Sukamaju tidak sebanding dengan wilayah yang luas dan banyaknya jumlah penduduk dengan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah serta kurang sejahtera (miskin) dan masih banyak infrastruktur jalan yang rusak. Sehingga status kemajuan Desa Sukamaju masih sangat membutuhkan prioritas kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pembangunan yang lebih baik.

2. Demografi

Desa Sukamaju berada di Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

a. Luas Desa Sukamaju	: 1320,5 Ha
✓ Tanah Sawah	: 306 Ha
✓ Tanah Pemukiman	: 418 Ha
✓ Tanah Peladangan	: 590 Ha
✓ Tanah Kuburan, Jalan Dll	: 6 Ha
✓ Tanah perkantoran	: 0,5 Ha
b. Iklim :	
✓ Curah Hujan	: 1.500 mm
✓ Jumlah Bulan Hujan	: 7 Bulan
✓ Suhu Rata-rata Harian	: 28 s/d 32 oC
✓ Tinggi Tempat	: 400 s/d 500 M/dpl
✓ Bentang Wilayah	: Datar

c. **Batas Wilayah :**

Sebelah Utara	Desa Semuli Raya
Sebelah Selatan	Desa Bandar Kagungan Raya Kec.Abung Selatan
Sebelah Barat	Desa Kalibalangan dan Desa Way Lunik
Sebelah Timur	Desa Tanjung Iman Kec.Blambangan

d. **Orbitasi**

- ✓ Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 2 Km
- ✓ Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 15 Km
- ✓ Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 99 Km
- ✓ Jarak ke Ibu Kota Negara : 313 Km

e. **Penduduk Desa Sukamaju:**

- ✓ Jumlah Penduduk : 4.419 Jiwa
- ✓ Jumlah Laki-Laki : 2.228 Jiwa
- ✓ Jumlah Perempuan : 2.191 Jiwa
- ✓ Jumlah KK : 1.337 KK
- ✓ Jumlah KK RTM : 385 KK

Tabel 2. 1.

Jumlah Penduduk Tahun 2019-2021

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	LAJU PERTUMBUHAN (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	2019	2.113	2.069	4.182	
2	2020	2.163	2.119	4.282	
3	2021	2.228	2.191	4.419	

Tabel 2.2.

Jumlah Rumah Tangga (KK) Tahun 2019-2021

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	1.203
2	2020	1.231
3	2021	1.337

5	KARYAWAN SWASTA	
6	PEDAGANG	
7	PETANI	
8	TUKANG	
9	SOPIR	...
10	BURUH	...
11	WIRASWASTA	

2) Pajak dan Retribusi Desa

NO	URAIAN	TAHUN	RP
1	Pajak Desa dan PBB	2019	Rp. 43.965.771
2	Pajak Desa dan PBB	2020	Rp. 44.118.926
3	Pajak Desa dan PBB	2021	Rp. 44.464.401

3) Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Batuan Provinsi

NO	URAIAN	2020	2021
1	Alokasi Dana Desa	Rp. 485.791.986	Rp. 479.170.100
2	Dana Desa	Rp. 972.874.000	Rp. 1.013.570.000
3	Bantuan Provinsi	Rp.-----	Rp. -----
4	Bagi Hasil Pajak	Rp. -----	Rp. 27.404.632
JUMLAH		Rp.	Rp.

b. Kelembagaan Desa

1) Pembagian Wilayah

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH RT	KETERANGAN
1	SUKAHARJO / RW 01	4	
2	SUKAMAJU I / RW 02	5	
3	SUKAMAJU II / RW 03	5	

Tabel 2.3**Jumlah Rumah Tangga (KK) / Kepadatan Per-Dusun (RW) Tahun 2021**

NO	NAMA DUSUN / RW	JUMLAH RUMAH TANGGA / KK
1	SUKAHARJO / RW 01	203
2	SUKAMAJU I / RW 02	194
3	SUKAMAJU II / RW 03	136
4	SUMBERINGIN / RW 04	331
5	SUKAJADI / RW 05	210
6	SUKAMAKMUR / RW 06	115
7	SUKARAME / RW 07	148
JUMLAH		1.337

3. Keadaan Sosial

Secara Sosial keadaan Desa Sukamaju dilihat dari beberapa aspek yaitu:

a. Pendidikan**1) Tingkat Pendidikan**

✓ TK / PAUD	:	143	Orang
✓ SD / MI	:	475	Orang
✓ SLTP / MTs / Sedrajat	:	216	Orang
✓ SLTA / SMK / MA / Sedrajat	:	222	Orang
✓ S2 / S1 / Diploma	:	96	Orang
✓ Putus Sekolah	:	495	Orang
✓ Buta Huruf	:	-	Orang
✓ Belum Sekolah	:	305	Orang

2) Lembaga Pendidikan

✓ TK / PAUD	:	2	Unit
✓ SD / MI	:	2	Unit
✓ SLTP / MTs / Sedrajat	:	1	Unit
✓ SLTA/MA	:	1	Unit
✓ Perguruan Tinggi	:	-	Unit

b. Keagamaan

1. Islam	:	4.122	orang
2. Katolik	:	107	orang
3. Kristen	:	73	orang
4. Hindu	:		orang
5. Budha	:		orang

c. Tempat Ibadah

1. Masjid	:	8	Unit
2. Musholla	:	11	Unit
3. Gereja	:	-	Unit
4. Pura	:	-	Unit
5. Wihara	:	-	Unit

4. Kesehatan**a. Tenaga Medis**

Jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di Desa Sukamaju :

No	Tenaga Kesehatan		Jumlah	Ket
1	Medis	Dokter Umum	1	
		Dokter Spesialis		
2	Keperawatan	Bidan	4	
		Perawat	9	
3	Partisipasi Masyarakat	Posyandu	6	
Jumlah				

b. Kesehatan**1) Penderita Penyakit**

✓ Penyakit Menular tahun ini	:		Orang
✓ Tidak Menular tahun ini	:		Orang
✓ Penderita yang meninggal tahun ini	:		Orang

2) Kematian Bayi

✓ Jumlah bayi lahir tahun ini	:		Orang
✓ Jumlah bayi meninggal tahun ini	:		Orang

3) Kematian ibu melahirkan

- ✓ Jumlah ibu melahirkan tahun ini : Orang
- ✓ Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : Orang

4) Gizi balita

- ✓ Jumlah balita : Orang
- ✓ Balita gizi buruk : Orang
- ✓ Balita gizi baik : Orang
- ✓ Balita gizi kurang : Orang

5. Kesejahteraan

Masalah kesejahteraan sosial Desa Sukamaju didominasi oleh masalah keluarga miskin, hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua untuk menentaskan kemiskinan tersebut, untuk masalah kesejahteraan dapat dilihat dari tabel berikut :

NO	Masalah Kesejahteraan	Jumlah	Keterangan
1	Keluarga Miskin Sosial	385	
2	Keluarga Rumah Tidak Layak Huni		
3	Jompo dan Lansia		
4	Anak Yatim dan Piatu		
5	Eks Narapidana	5	
6	Korban Bencana Alam Banjir	3	
7	Pemulung	-	

a. Keadaan Ekonomi

1) Mata Pencaharian / Pekerjaan / Jenis Usaha Penduduk

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	PNS / TNI / POLRI	83
2	PENSIUNAN PNS / TNI / POLRI	17
3	DOSEN / GURU / HONORER	
4	DOKTER / BIDAN / PERAWAT	14

4	SUMBERINGIN/ RW 04	9	
5	SUKAJADI / RW 05	5	
6	SUKAMAKMUR/ RW 06	3	
7	SUKARAME / RW 07	4	

2) Lembaga Pemerintahan

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Kepala Desa	1	
2	Sekretaris Desa	1	
3	Kepala Urusan	3	
4	Kepala Seksi	3	
5	Kepala Dusun/RW	7	
6	Ketua RT	35	
7	Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor	2	

3) Kepala Desa : H.EDY SUTRISNO A.md Kop Perangkat Desa

- ✓ Sekretaris Desa :SUHADI
- ✓ Kepala Urusan Keuangan :TRI UTAMI
- ✓ Kepala Urusan Perencanaan :DWI HANDRI KURNIAWAN
- ✓ Kepala Urusan Tata Usaha/Umum :MARTINUS TRI SUDRAJAD
- ✓ Kepala Seksi Pelayanan :ASEP CAHYADI
- ✓ Kepala Seksi Pemerintahan :WURI DEVITA NOVI DIASTUTI
- ✓ Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat :YOSI TRI ASTUTI

Kepala Kewilayahan/Dusun/RW/RT

- ✓ Kepala Dusun RW 01 : SAMUJI
- Ketua RT 01 : WALUYO
- Ketua RT 02 : RAGIMIN
- Ketua RT.03 : JUHRI
- Ketua RT.04 : SUPARJONO

✓ Kepala Dusun RW 02	: B.JOKO UTOMO
Ketua RT 01	: KUADI
Ketua RT 02	: L. RUGIMAN
Ketua RT 03	: SUROYO
Ketua RT.04	: SUBARI
Ketua RT.05	: WARDI
✓ Kepala Dusun RW 03	: EKO PRIBADI
Ketua RT 01	: SUTOPO
Ketua RT 02	: SRIYONO
Ketua RT 03	: SLAMET
Ketua RT 04	: RIWANTO
Ketua RT 05	: SUMADI
✓ Kepala Dusun RW 04	: EDDY SASONGKO
Ketua RT 01	: PAIMAN
Ketua RT 02	: MANSUR
Ketua RT 03	: NGALIMAN
Ketua RT 04	: SUMARJO
Ketua RT 05	: WAHYUDI
Ketua RT 06	: AHMAD KHOIRI
Ketua RT 07	: MAS UD
Ketua RT 08	: EDY HERFANTO
Ketua RT 09	: JUMINGAN
✓ Kepala Dusun RW 05	: SAIFUL ANAM
Ketua RT 01	: WAWAN WIGUNA
Ketua RT 02	: SARNO
Ketua RT 03	: SUBANDI
Ketua RT 04	: MISYONO
Ketua RT 05	: M.SOBIRIN
✓ Kepala Dusun RW 06	: SARNO
Ketua RT 01	: WAHYUDI
Ketua RT 02	: EKO KIRMONO
Ketua RT 03	: SUTARNO
✓ Kepala Dusun RW 07	: WAHYUDI
Ketua RT 01	: SAPRUDIN

Ketua RT 02 : ASMARI JAFAR
Ketua RT 03 : MISWANTO
Ketua RT 04 : PURSITO

d) Petugas Kebersihan dan Penjaga Balai Desa

✓ Petugas dan Penjaga : SUTOPO
▪ : SITI MUKHAROMAH

e) Satuan Pelaksana Teknis

✓ Ketua PPL : ADE
✓ Ketua P3A : AGUS SUPRIYANTO
✓ Ketua GAPOKTAN : GURUH FARID HELMI

f) Lembaga Kemasyarakatan/BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA)

Berdasarkan Undang – Undang dan Peraturan yang berlaku Badan Permusyawaratan Desa kemudian disingkat dengan BPD, pada tahun 2017-2023 berjumlah 9 Anggota, Yaitu :

Ketua : RIMANTO SLAMET.S.Pd., M.Pd
Wakil Ketua : SUYATNO
Sekretari : SUJARWANTO
Bendahara : SUNARDI
Anggota : SUTANTIYO
: WAGINAH
: AHMAD BAJURI
: SUKIYEM
: TRI WIYONO

g) Data Organisasi Kemasyarakatan

Dalam Upaya Peningkatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, Desa Sukamaju memiliki beberapa Organisasi Kemasyarakatan guna untuk menunjang kegiatan Pemerintahan sebagai mitra dalam pengawasan serta kegiatan kegiatan di Desa Sukamaju, adapun organisasi kemasyarakatan tersebut adalah :

1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Ketua : SUPARMAN
Anggota : 1. TULUS
2. HARYONO
3. SLAMET SUPRAPTO
4. SAROHMAN
5. SARBINI
6. SUWANTO

2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Ketua : JUWONO
Sekretaris : RARAS HANDAYANI
Bendahara : SUSTINAH

3) Organisasi Kepemudaan Karang Taruna

Ketua : GURUH FARID HELMY
Sekretaris : RARAS HANDAYANI
Bendahara : A.MUHARI
1. Bidang Humas : 1. ABDI PARANTO
2. DEDI KURNIAWAN
2. Bidang Olah Raga dan Budaya : 1. MAS UD
2. DEWI PUSPITA SARI
3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan : 1. ANDRI INDRAWAN
2. LUSIANTO
4. Bidang Rohani & Pembinaan Mental : 1. EDY SUSANTO
2. TEGUH TRI HARYANTO
5. Bidang Lingkungan & Kesehatan : 1. TONO
2. ARI WIJAYANTI
6. Bidang Ekonomi dan UKS : 1. AGUNG HERMAWAN
2. DIDIK

4) Organisasi Keagamaan

✓ NU
✓ MATAZISH
✓ BKMT
✓ MUSLIMAT

5) Kelompok Tani

- ✓ Karya Remaja
- ✓ Al Ihya
- ✓ Harapan Maju
- ✓ Harapan Jaya
- ✓ Sumber Urep
- ✓ Sejahtera
- ✓ KWT Usaha Sejahtera
- ✓ Usaha Makmur
- ✓ Karang Kadempel
- ✓ Mekar Jaya
- ✓ Usaha Bersama
- ✓ Sumber Harapan
- ✓ Condro Kirono
- ✓ Tunas Jaya
- ✓ Sumber Rejeki
- ✓ Rizki Makmur
- ✓ Taruna Tani
- ✓ KWT Melati
- ✓ Mitra Tani
- ✓ Mandiri
- ✓ Tunas Jaya Makmur
- ✓ KWT Anisa
- ✓ Mugi Lestari
- ✓ Ringin Makmur

C. STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)

D. MASALAH DAN POTENSI

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Sukamaju terdapat berbagai masalah dan potensi yang diidentifikasi dari proses kajian Desa sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

NO	BIDANG	MASALAH	POTENSI
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Perlu peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa	Perangkat Desa Lengkap
		Perlu peningkatan kesejahteraan Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Ketua dan Anggota BPD, LPM, dan Karang Taruna,
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jalan Desa masih banyak yang belum di Aspal	Badan Jalan, Onderlagh, Swadaya masyarakat
		Masih banyak Jalan Desa yang belum di Onderlag	Badan Jalan , Tenaga Swadaya Masyarakat
		Perlunya pembukaan Jalan Baru	Jalan Setapak
		Perlunya pembangunan SPAH	Tenaga Gotong Royong,
		Gedung Pendidikan, Muebeler dan Alat Peraga educatif belum memadai, perlu dilengkapi	Lembaga Pendidikan TK / PAUD
		Perlunya pembuatan Talut dan Siring	Tenaga Gotong Royong,
		Kekurangan debit air ketika musim Kemarau, Perlu pembuatan Sumur Bor	Lokasi Sumur Bos, tenaga Gotong Royong
		Perlunya pembuatan gorong gorong	Tenaga Gotong Royong

		Kurangnya Kesejahteraan dan Tempat Pelayanan Posyandu	Kader Posyandu Cukup Peserta Posyandu banyak
		Kurangnya Kesejahteraan dan tempat pelayanan Poskesdes	Adanya kader Poskesdes
		Lemahnya permodalan SPP	Kelompok SPP , Pemakain Modal
		Paping Blok Fasilitas Pendidikan dan Jalan Gang Desa	Tempat pendidikan , Tenaga Gotong Royong
		Kurangnya Sarana POS Ronda	Linmas , Warga
		Kondisi Tempat pemandian Umum sangat buruk dan tidak layak	Lokasi Tempat Pemandian Umum, Sumber Air Deras
		Masjid belum di mamadai	Tenaga Sukarela Masyarakat
		Sarana Pendidikan Tingkat SMP Negeri dan SMA Negeri Tidak ada	Tenaga Masyarakat , Lahan Tanah
3	Pembinaan Kemasyarakatan	PKK Kurang Aktif, Perlu Pembinaan	Pengurus dan Anggota PKK
		Perlunya pembinaan masyarakat terhadap Siskamling	Anggota Linmas Cukup
		Perlunya pembinaan antar umat beragama	Masyarakat, Tokoh Agama , Tokoh Pemuda
		Kurangnya sarana dan prasarana olahraga di Desa	Tenaga Sukarela masyarat
		Karang taruna kurang aktif , perlu pembinaan	Adanya ketua dan anggota Karang taruna

		Perlunya pembinaan kesenian kuda lumping	Kelompok Kuda Lumpung
		Kelompok Seni budaya “ pencak silat” Perlu pembinaan lebih lanjut	Kelompok
		Perlunya peningkatan Status Faskes dari Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas	Gedung Puskesmas, Tenaga medis
		Alat pertanian, Bibit Unggul dan Pupuk kurang memadai untuk gapoktan	Gapoktan , kelompok Tani
		Perlunya pelatihan kelompok tani	Kelompok Tani
4	Pemberdayaan Masyarakat	Perlunya pelatihan kader dan aparat Desa	Kader dan Aparat Desa
		Perlunya pelatihan kelompok tani pembudidaya Sayur Mayur	Kelompok Tani
		Kelompok tani Padi perlu pembinaan dan pelatihan	Kelompok Tani
		Perlunya pelatihan kader kesehatan masyarakat	Kader kesehatan Obat obatan cukup
		Kurangnya pengetahuan keorganisasian gapoktan	Organiasi gapoktan
		Perlunya Pelatihan Karang Taruna	Masyarakat, Tokoh Pemuda
5		Penanggulangan Bencana	Korban Bencana
		Pemulihan Ekonomi	Pemberian BLT Untuk Rumah Tangga Miskin (RTM)
		Keadaan Darurat	Penanggulangan Keadaan Yang Mendesak

		Keadaan Darurat	Penanggulangan Yang Bersifat Nasional
--	--	-----------------	---

BAB III
PROSES PENYUSUNAN RPJM-DESA

Rangkaian proses penyusunan RPJMDesa, Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara diawali dengan penjaringan masalah yang dilakukan secara partisipatif di masing-masing dusun. Dari kegiatan ini menghasilkan data dan informasi dari tingkat komunitas, yang selanjutnya oleh Tim Perencana Desa menyelenggarakan Lokakarya Desa untuk mengkompilasikan data hasil penjaringan masalah tersebut. Adapun secara rinci proses kegiatan penyusunan RPJMDesa tersebut adalah sebagai berikut :

A. MUSYAWARAH DUSUN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dimulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Desa Sukamaju dengan menggunakan alat :

- C. Sketsa Desa;
- D. Kalender Musim; dan
- E. Diagram Kelembagaan.

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum Musyawarah Dusun yang dilakukan pada :

No	Dusun	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1	Dusun Sukaharjo		
2	Dusun Sukamaju I		
3	Dusun Sukamaju II		
4	Dusun Sumberingin		
5	Dusun Sukajadi		
6	Dusun Sukamakmur		
7	Dusun Sukarame		

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat dusun, kemudian dituangkan ke dalam format Pengkajian Dusun dan Desa.

B. MUSYAWARAH DESA

Proses penyusunan program dan kegiatan selanjutnya dilakukan dalam Lokakarya di tingkat desa yang dilaksanakan pada tanggal Desember 2021 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasi dan mengelompokkan masalah-masalah serta potensi dari hasil Musyawarah Dusun;
2. Menyusun Legenda dan sejarah Desa;
3. Membuat skala prioritas. Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan (*skoring*).
4. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah. Setelah seluruh masalah dirangking berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama, maka tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
5. Menetapkan tindakan yang layak
Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini dipisahkan juga antara pembangunan skala desa dan pembangunan skala kabupaten.

C. MUSRENBANG DESA

Berdasarkan Lokakarya Desa Perencanaan Partisipatif, hasil yang dicapai masih berupa draft Dokumen RPJMDesa, maka oleh Tim Perencana Desa kemudian dikonsultasikan kepada publik melalui Musrenbang Desa yang dilaksanakan pada tanggal Desember 2021 untuk mendapatkan tanggapan atau masukan dari masyarakat serta narasumber. Usulan atau masukan dari masyarakat yang disetujui oleh forum Musrenbangdesa akan ditambahkan dalam Dokumen RPJMDesa.

D. PENGESAHAN RPJMDESA

Draft RPJMDesa yang sudah direvisi dalam forum Musrenbang Desa kemudian ditetapkan Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

E. SOSIALISASI RPJMDESA

Tahap selanjutnya merupakan sosialisasi RPJMDesa yang dilakukan di tiap-tiap RT, RW atau Dusun melalui pertemuan-pertemuan rutin serta ditempelkan di papan informasi yang ada, baik di tingkat RT, RW, Dusun maupun Desa.

BAB IV

VISI DAN MISI

A. VISI DESA

Pembangunan Kabupaten Lampung Utara pada tahap pertama RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2015-2025 dan RPJM Daerah tahun 2019-2024 menuntut perhatian yang serius, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan ketika Kabupaten Lampung Utara sebagai kabupaten induknya dan menjadi kabupaten tertua di provinsi Lampung, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Kabupaten Lampung Utara yang berada pada jalur koridor utara Provinsi Lampung, mendorong Lampung Utara berperan sebagai daerah muka bagi wilayah hinterland nya.

Berbagai isu nasional dan global seperti penanggulangan kemiskinan (Poverty Reduction), peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, serta penjaminan kelestarian lingkungan hidup perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada masalah kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Lampung Utara antara lain mencakup; kepadatan penduduk, PDRB Perkapita yang rendah, keterbatasan kesempatan kerja, penataan ruang dan lingkungan hidup, serta infrastruktur.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar yang berwawasan tata ruang, struktur perekonomian yang kokoh, peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "*Good Governance and Clean Government*", serta kondusifitas lingkungan wilayah dalam bingkai agama dan budaya melalui optimalisasi pemanfaatan segenap potensi sumber daya yang dimiliki dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, permasalahan, potensi, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Lampung Utara serta selaras dengan moto pemerintah Kabupaten Lampung Utara “Ragem Tunas Lampung.” Motto tersebut memiliki dua arti. Pertama, masyarakat adat Lampung Utara menerima keanekaragaman/ perbedaan sebagai modal untuk kemajuan bersama. Kedua, keramah tamahan yang dilandasi oleh niat baik untuk menjalin hubungan persaudaraan. Disana terdapat beberapa taman yang salah satu sudutnya terdapat aksara besar bertuliskan “**KOTABUMI BETTAH**”. Kata-kata tersebut adalah motto dari Kota Kotabumi yang merupakan singkatan dari “Kotabumi Bersih Elok Tenram Taqwa Aman Hidup”.dan Kabupaten Lampung Utara periode 2019-2024 memiliki Visi “**MASYARAKAT LAMPUNG UTARA YANG AMAN, AGAMIS, MAJU, DAN SEJAHTERA**” maka Untuk mendukung visi kabupaten Lampung Utara Desa Sukamaju memiliki Visi yaitu “Terwujudnya Masyarakat Desa Sukamaju yang Maju, Tenram, Makmur, Sejahtera dan Dinamis.

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sukamaju baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Sukamaju mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

B. MISI DESA

Kabupaten Lampung Utara sebagaimana di dalam RPJM Daerah tahun 2019-2024 memuat misi Kabupaten Lampung Utara yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung Utara yang berkualitas dan berbudaya;
2. Mewujudkan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan yang mendukung pengembangan sektor strategis;
3. Mewujudkan kestabilan dan kondusivitas daerah;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang prima; dan

5. Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif di Provinsi Lampung

Sedangkan guna mendukung misi tersebut maka Desa Sukamaju mempunyai misi antara lain:

1. Menciptakan kondisi masyarakat Desa Sukamaju yang aman, tertib, guyup dan rukun dalam hidup bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip;
 - Duduk sama rendah, Berdiri sama tinggi
 - Ringan sama dijinjing, berat sama di pikul
 - Sepi ing Pamrih, Rawe ing gawe, Nrimo ing pandum
2. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat
 - Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
 - Pemberdayaan Lembaga-lembaga Desa dan Kepemudaan
 - Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
3. Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Pelayanan masyarakat yang Prima yaitu Cepat, Tepat dan Benar
 - Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel
 - Pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan dan Mengedepankan partisipasi serta Gotong rorong.

BAB VI

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. PEMBANGUNAN DESA SUKAMAJU

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada pada ranah pembangunan di daerah dan menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Aparatur Desa Sukamaju menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya berpikir strategik untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan urusan pembangunan yang lebih baik, dapat diwujudkan sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu maka suatu strategi dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari setiap program pembangunan sesuai dengan kondisi wilayah.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Sukamaju ini merupakan rencana strategis Desa Sukamaju untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RPJM Desa tersebut nantinya

akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) merupakan panduan dan rujukan bagi penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa selama kurun waktu enam tahun kedepan. Oleh karena itu, substansi RPJM Desa mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan desa, dan meliputi seluruh fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD). Sesuai dengan cakupan kewenangan yang ada pada pemerintah desa, strategi yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa Sukamaju Tahun 2022-2027 meliputi 3 (tiga) agenda pokok, yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang baik;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; dan
3. Meningkatkan kemandirian masyarakat.

Tiga agenda tersebut akan terealisasi melalui strategi pembangunan desa. Strategi adalah teknik mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh pemerintahan desa dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan desa dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan; dan
2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Sukamaju Tahun 2022-2027, perlu dilaksanakannya implementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

TABEL 5.1

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA SUKAMAJU YANG MAJU, TENTRAM, MAKMUR, SEJAHTERA DAN DINAMIS

Misi 1 : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH SERTA RUTILITAS DASAR SESUAI DENGAN TATA RUANG WILAYAH PEDESAAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur publik dan permukiman.	1. Terwujudnya tata ruang wilayah pedesaan sesuai arah pemanfaatan ruang wilayah jangka menengah (enam tahunan)	Meningkatkan kualitas regulasi dan perencanaan dan tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang.	Peningkatan kualitas regulasi dan perencanaan tata ruang sebagai acuan pemanfaatan ruang.
		Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.	Peningkatan pemanfaatan ruang dan ketertiban dokumen pertanahan
	2. Tersedianya jaringan jalan, jaringan air, jembatan, sarana pemerintahan dan infrastruktur publik Desa yang merata dan	Tersusunnya jaringan transportasi yang handal dan terintegrasi guna mendorong kelancaran aksesibilitas wilayah serta mobilitas barang/jasa dan	Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan, jembatan, dan pelengkap jalan serta penataan kawasan sungai.

	berkualitas.	manusia	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah dan infrastruktur publik
		Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran pemerintah. Meningkatnya sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan aktifitas ekonomi.	Peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Sukamaju

MISI 2: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN POTENSI DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan berlandaskan pada struktur	1. Berkembangnya sarana prasarana perekonomian masyarakat pada pusat pertumbuhan primer, sekunder dan tersier.	Meningkatkan kapasitas lembaga dan pemberdayaan koperasi, UMKM, industri kecil, serta pengendalian perdagangan.	Peningkatan kapasitas lembaga dan pemberdayaan koperasi, UMKM, industri kecil, serta pengendalian perdagangan.

<p>perekonomian yang kokoh</p>	<p>2. Meningkatkan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>Meningkatkan kapasitas tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja.</p>	<p>Penurunan pengangguran di Desa Sukamaju.</p>
<p>2. Terwujudnya kualitas ketahanan pangan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.</p>	<p>1. Meningkatkan produksi dan produktifitas hasil pertanian dan peternakan.</p>	<p>Meningkatkan produksi dan produktifitas hasil pertanian</p> <p>Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi peternakan.</p>	<p>Peningkatan daya saing produksi pertanian untuk memperkuat swasembada pangan Desa Sukamaju.</p> <p>Peningkatan kapasitas peternak dan pengembangan bibit ternak serta sarana yang berkualitas.</p>
<p></p>	<p>2. Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas.</p>	<p>Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dan stok pangan masyarakat.</p>	<p>Peningkatan ketersediaan pangan dan pengembangan cadangan pangan.</p>
<p></p>	<p>3. Meningkatkan produksi secara berkualitas</p>	<p>Meningkatkan produksi dan nilai tambah daya saing produk perikanan.</p>	<p>Pengembangan budidaya ikan air tawar secara terpadu dan peningkatan produksi ikan olahan.</p>
<p></p>	<p>4. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan</p>	<p>Meningkatkan pengelolaan dan</p>	<p>Peningkatan upaya pengelolaan sampah, pengawasan dan</p>

hidup berkelanjutan.	secara	pengendalian lingkungan hidup.	pengendalian lingkungan hidup.
----------------------	--------	--------------------------------	--------------------------------

MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang produktif dan berdaya saing	1. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bagi semua lapisan masyarakat secara merata.	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang berkarakter bagi semua lapisan masyarakat. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan serta arsip Desa	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Desa Sukamaju Peningkatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan serta arsip Desa.
	2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.	Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.	Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.
	3. Meningkatkan kapasitas pemuda, prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya.	Meningkatkan kapasitas kepemudaan dan prestasi olahraga Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai lihur seni dan budaya lokal.	Peningkatan kapasitas generasi muda dan pembinaan olahraga Peningkatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai lihur seni dan budaya lokal.

MISI 4 : MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN MENERAPKAN KAIDAH-KAIDAH "GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT".

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan ketenteraman masyarakat.	1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara prima.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif.	Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif.
	2. Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan sistem pemerintahan Desa.	Penggunaan sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi
	3. Terintegrasinya sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan secara berkualitas.	Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah.	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah.
		Mengoptimalkan pendapatan dan pengelolaan keuangan serta aset Desa.	Optimalisasi pendapatan dan pengelolaan keuangan serta aset Desa.

MISI 5 : MEMBANGUN MASYARAKAT RELIGIUS, BERBUDAYA, TENTRAM DAN HARMONIS

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<p>Terwujudnya masyarakat religius, berbudaya, tentram dan harmonis.</p>	<p>1. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib dan aman.</p>	<p>Meningkatkan keamanan, ketertiban, toleransi, dan penanggulangan penyakit sosial masyarakat, masyarakat, Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.</p>	<p>Peningkatan upaya penciptaan keamanan dan ketertiban, serta penanggulangan penyakit sosial masyarakat. Peningkatan mitigasi dan pelayanan tanggap darurat bencana.</p>

B. PERMASALAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan daerah merupakan program strategis Daerah yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai beberapa hasil (*outcome*) yang memiliki dampak (*impact*) terhadap pencapaian indikator sasaran.

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Akan tetapi didalam melaksanakan program tersebut terdapat permasalahan, adapun permasalahannya antara lain:

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah:

1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal;
2. Kualitas SDM aparatur pemerintah desa masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan;
3. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjawab tuntutan reformasi;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum masih relative kurang.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata;
2. Pemahaman, penghayatan dan pangamalan ajaran agama dikalangan peserta didik belum menunjukkan hasil yang memuaskan;

3. Lembaga social keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum mampu memerankan fungsi sebagai agen perubahan social yang dinamis.

Selain itu permasalahan mendasar dalam upaya peningkatan kemandirian masyarakat adalah terbatasnya akses sebagian besar masyarakat terhadap sumber daya sosial dan ekonomi, berkurangnya prakarsa, peranserta dan lemahnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

C. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Program Desa Sukamaju dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menetapkan Desa Sukamaju sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan. Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

1. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa.
 - a. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
 - b. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
 - c. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
 - d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
 - e. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius
2. Menetapkan prioritas pengembangan Desa.
 - a. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur peDesaan
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana umum
 - c. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi.

	hidup secara berkelanjutan.	pengendalian lingkungan hidup.	pengenda
--	-----------------------------	--------------------------------	----------

MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF DAN BERDAYA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	AR
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang produktif dan berdaya saing	1. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bagi semua lapisan masyarakat secara merata.	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang berkarakter bagi semua lapisan masyarakat. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan serta arsip Desa	Peningkatan prasarana pendidikan Sukamaju Peningkatan pengembangan serta arsip Desa
	2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.	Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.	Peningkatan prasarana pelayanan yang memadai.
	3. Meningkatkan kapasitas pemuda, prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya.	Meningkatkan kapasitas kepemudaan dan prestasi olahraga Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur seni dan budaya lokal.	Peningkatan muda dan pelestarian Peningkatan pengembangan seni dan budi

MISI 4 : MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN MENERAPKAN KAIDAH-KAIDAH "GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT".

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan ketenteraman masyarakat.	1. Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara prima.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif.	Peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem pemerintahan yang inovatif.
	2. Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan sistem pemerintahan Desa.	Penggunaan sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi
	3. Terintegrasinya sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan secara berkualitas.	Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah.
		Mengoptimalkan pendapatan dan pengelolaan keuangan serta aset Desa.	Optimalisasi pendapatan dan pengelolaan keuangan serta aset Desa.

MISI 5 : MEMBANGUN MASYARAKAT RELIGIUS, BERBUDAYA, TENTRAM DAN HARMONIS

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya masyarakat religius, berbudaya, tentram dan harmonis.	<p>1. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib dan aman.</p>	<p>Meningkatkan keamanan, ketertiban, toleransi, dan penanggulangan penyakit sosial masyarakat,</p> <p>Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.</p>	<p>Peningkatan upaya penciptaan keamanan dan ketertiban, serta penanggulangan penyakit sosial masyarakat.</p> <p>Peningkatan mitigasi dan pelayanan tanggap darurat bencana.</p>

B. PERMASALAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan daerah merupakan program strategis Daerah yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai beberapa hasil (*outcome*) yang memiliki dampak (*impact*) terhadap pencapaian indikator sasaran.

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Akan tetapi didalam melaksanakan program tersebut terdapat permasalahan, adapun permasalahannya antara lain:

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah:

1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal;
2. Kualitas SDM aparatur pemerintah desa masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan;
3. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjawab tuntutan reformasi;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum masih relative kurang.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata;
2. Pemahaman, penghayatan dan pangamalan ajaran agama dikalangan peserta didik belum menunjukkan hasil yang memuaskan;

3. Lembaga social keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum mampu memerankan fungsi sebagai agen perubahan social yang dinamis.

Selain itu permasalahan mendasar dalam upaya penigkatan kemandirian masyarakat adalah terbatasnya akses sebagian besar masyarakat terhadap sumber daya sosial dan ekonomi, berkurangnya prakarsa, peranserta dan lemahnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

C. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Program Desa Sukamaju dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menetapkan Desa Sukamaju sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan. Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

1. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa.
 - a. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
 - b. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
 - c. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
 - d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
 - e. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius
2. Menetapkan prioritas pengembangan Desa.
 - a. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur peDesaan
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana umum
 - c. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi.

BAB VII

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di Desa, penyelenggaraan pemerintahan di Desa, pemberdayaan masyarakat di Desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di Desa, penyelenggaraan pemerintahan di Desa, pemberdayaan masyarakat di Desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- a. Pendapatan Desa bersumber APB Desa dan Dana dari Pemerintah.
- b. Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa.
- c. Pendapatan dari APB Des dan dari Pemerintah dikelola oleh Kaur Keuangan.

2. Arah Pengelolahan Belanja Desa

- a. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Intensif RT dan RW;
- c. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. Tunjangan Operasional BPD;
- e. Program Operasional Pemerintahan Desa;
- f. Program Pelayanan Dasar;
- g. Program Pelayanan Dasar Infrastruktur;
- h. Program Kebutuhan Primer Pangan;
- i. Program Pelayanan Dasar Pendidikan;
- j. Program Pelayanan Kesehatan;
- k. Program Kebutuhan Primer Sandang;
- l. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- m. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
- n. Program Ekonomi produktif;
- o. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Desa;
- p. Program Penunjang Peringatan Hari-hari Besar;
- q. Program Dana Bergulir.

3. Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

BAB VIII

KEBIJAKAN UMUM

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 6 tahun (2021-2027) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan kebijakan Pemerintah Desa Sukamaju, maka pembangunan Desa Sukamaju dibagi menjadi *dua tahap pembangunan*, yaitu tahap perwujudan masyarakat Sukamaju yang lebih sejahtera lahir dan batin (tahun 2021-2027), dan tahap kelanjutan peningkatan pelayanan publik (tahun 2021-2027).

A. TAHAPAN PERWUJUDAN MASYARAKAT SUKAMAJU YANG LEBIH SEJAHTERA

Tahap ini merupakan peningkatan kemampuan masyarakat Desa Sukamaju dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian dan sumber daya alam.

Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap perwujudan masyarakat Sukamaju yang lebih sejahtera (tahun 2021-2027) adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal.
- b) Penguatan ketrampilan dan kewirausahaan.
- c) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d) Peningkatan pemerataan pembangunan.
- e) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- f) Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial.
- g) Peningkatan program pro-rakyat (penanggulangan kemiskinan).
- h) Peningkatan kesadaran hukum.
- i) Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik.
- j) Perintisan dan pengembangan industri kecil, perdagangan dan pariwisata di bidang pertanian dalam arti luas.

B. TAHAPAN KELANJUTAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Tahap ini merupakan kelanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik, program-program yang telah disusun dengan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukamaju Tahun 2021-2027 serta percepatan

peningkatan sumber daya manusia. Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap ini (tahun 2021-2027) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi.
2. Peningkatan jalan potensial ekonomi.
3. Peningkatan potensi ekonomi lokal.
4. Peningkatan pelayanan kesehatan.
5. Peningkatan pendidikan terjangkau.
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur kepentingan umum.
7. Penyediaan tempat distribusi barang dan jasa.
8. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam.
9. Peningkatan promosi untuk menarik investor di bidang industri, perdagangan dan pariwisata yang terkait dengan produksi pertanian.
10. Mempermudah perijinan dan memfasilitasi investor yang bergerak di bidang industri, perdagangan dan pariwisata yang terkait dengan produksi pertanian.

BAB IX
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

A. PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Program Pelayanan Umum

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat dan alat tulis kantor;
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik, surat kabar;
 - 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - 4) Penyediaan makanan dan minuman/jamuan tamu.
 - 5) Rapat-rapat koordinasi.
 - 6) Rapat-rapat konsultasi keluar Desa.
 - 7) Honorarium/belanja pegawai.
 - 8) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - 9) Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - 10) Tunjangan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa.
 - 11) Tunjangan BPD.
 - 12) Penyediaan jasa PBB Tanah Kas Desa.
 - 13) Penyediaan Lain-lain

- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Pemeliharaan rutin/berkala komputer, notebook, printer, kamera.
 - 2) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat listrik, alat-alat kebersihan.
 - 3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.
 - 4) Pemeliharaan Papan Informasi dan Papan Organisasi.
 - 5) Pengadaan barang lain-lain kantor.
 - 6) Pengadaan Belanja Lain-lain.

- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 1) Pengadaan mesin/kartu absensi.
 - 2) Pengadaan pakaian dinas aparatur dan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa.

- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
 - 1) Pendidikan dan pelatihan formal.
 - 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
 - 3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja.
 - 2) Penyusunan laporan keuangan Semester.
 - 3) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
 - 4) Penyusunan dokumentasi kegiatan.
 - 5) Pendataan, pengolahan data profil desa dan data tingkat perkembangan desa.
 - 6) Pengadaan papan nama proyek dan prasasti kegiatan.

2. Program Pelayanan Dasar

a) Kesehatan

Arah kebijakan di bidang kesehatan ini antara lain pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan upaya kesehatan secara mandiri untuk mewujudkan program Pengembangan Desa Siaga, meliputi :

- 1) Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - (a) Pelayanan kesehatan di Polindes.
 - (b) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.
 - (c) Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah.
 - (d) Pengadaan Mobil Ambulance Desa.
- 2) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - (a) Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil.

- (b) Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu.
 - (c) Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.
- 3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan indikasi kegiatan antara lain :
- (a) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi.
 - (b) Pemberian makanan tambahan dan vitamin.
 - (c) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gizi buruk, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.
 - (d) Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi (Kadarzi).
- 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikasi kegiatan antara lain :
- (a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.
 - (b) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.
 - (c) Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan.
 - (d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 5) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita, dengan indikasi kegiatan meliputi :
- (a) Penyuluhan kesehatan anak balita.
 - (b) Imunisasi bagi anak balita.
 - (c) Pelatihan dan/atau pendidikan perawatan anak balita.
- 6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan indikasi kegiatan antara lain :
- (a) Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat.
 - (b) Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.

b) Pendidikan

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- (a) Pengembangan sarana dan prasarana PAUD dan TK formal.
 - (b) Pemberian bantuan operasional kegiatan PAUD dan TK formal.
 - (c) Pengadaan perlengkapan dan mebelair sekolah
 - (d) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi.
- 2) Pendidikan Dasar, dengan indikasi kegiatan meliputi :
- (a) Pemberian bantuan operasional kegiatan pendidikan dasar.
- 3) Pendidikan Non Formal, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- (a) Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal.
 - (b) Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal.
 - (c) Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan.
 - (d) Pengembangan pendidikan keaksaraan dan kecakapan hidup (life skill).

c) Pekerjaan Umum

Kebijakan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum terutama bagi masyarakat ekonomi lemah dan peningkatan sarana prasarana kepentingan umum dan sebagai peningkatan ketahanan pangan untuk pertanian. Kebijakan ini meliputi kegiatankegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pembangunan Jalan dengan indikasi kegiatan meliputi:
 - a) Pembangunan dan betonisasi jalan.
 - b) Pengerasan Jalan
- 2) Program Pembangunan Saluran / drainase / Gorong-gorong / Talud / SPAH / SPAL dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pembangunan saluran/drainase/SPAH/SPAL
 - b) Pembangunan Talud/

- 3) Program Pemeliharaan Jalan, dengan indikasi kegiatan :
 - a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
- 4) Program Pemeliharaan Saluran / drainase / gorong-gorong / talud / SPAH/ SPAL dengan indikasi kegiatan :
 - (a) Rehabilitasi / pemeliharaan saluran / drainase / gorong-gorong / talud / SPAH / SPAL
- 5) Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan indikasi kegiatan :
 - (a) Pengadaan Program Desa Wisata dan Agro wisata
 - (b) Pengadaan Taman Desa.
 - (c) Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Desa.
 - (d) Pembangunan Gapura di Dusun-dusun.
- 6) Program Pembangunan dan pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan indikasi kegiatan meliputi:
 - (a) Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan irigasi desa.

d) Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Kebijakan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum terutama bagi masyarakat ekonomi lemah dan peningkatan Sumber daya masyarakat guna peningkatan sumber penghasilan masyarakat di sector ekonomi.

Kebijakan ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan usaha mikro untuk masyarakat :
 - (a) Pembentukan Kelompok Usaha Mikro untuk masyarakat
 - (b) Pemberian permodalan bagi kelompok usaha mikro
- 2) Program Penguatan Permodalan bagi BUMDes.
 - (a) Peningkatan Permodalan BUMDes
 - (b) Menggali Sumber Daya Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui unit usaha milik BUMDes.

e) Perencanaan Pembangunan

Penekanan kebijakan perencanaan pembangunan adalah membuat perencanaan pembangunan yang realistis dan *capable*.

- 1) Program Pengembangan data / Informasi, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - (a) Pengumpulan, *updating*, dan analisis data informasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.
 - (b) Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - (a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan perencanaan pembangunan desa.
 - (b) Peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana.
 - (c) Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan desa.
 - (d) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan desa.
- 3) Program Perencanaan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - (a) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik.
 - (b) Penyusunan dokumen RPJM-Desa.
 - (c) Penyusunan Rancangan RKP-Desa.
 - (d) Penyelenggaraan Musrenbangdesa RPJM-Desa & RKP-Desa.

f) Lingkungan Hidup

Penekanan kebijakan disini antara lain meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang sesuai daya dukung lingkungannya.

- 1) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

- (a) Konservasi sumber - sumber air dan pengendalian kerusakan sumber - sumber daya air.
- 2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan indikasi kegiatan :
 - (a) Program Pemanfaatan Fasilitas Umum.
 - (b) Pengelolaan tanaman penghijauan.
 - (c) Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan,
- 3) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - (a) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
 - (b) Penyuluhan hukum pertanahan.
- 4) Program penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - (a) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

g) Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penekanan kebijakan ini mempunyai sasaran untuk mengendalikan pertumbuhan dan kualitas penduduk serta tertib administrasi kependudukan.

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan indikasi kegiatan ini meliputi :
 - (a) Pembangunan dan pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan secara terpadu.
 - (b) Pelatihan tenaga PPDP.
 - (c) Pembentukan Desa Berbasis Online Data.
 - (d) Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, *updating*, pemeliharaan).
 - (e) Fasilitasi pelaksanaan KTP elektronik (e-KTP).
 - (f) Koordinasi pelaksanaan administrasi kependudukan.

h) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan perlindungan kepada anak.

- 1) Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - (a) Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
 - (b) Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.
 - (c) Pelaksanaan sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - (d) Pelaksanaan penetapan kebijakan Desa Layak Anak.
- 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - (a) Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan.
- 3) Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan.
 - (a) Pembinaan organisasi perempuan.
 - (b) Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.
 - (c) Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan.
 - (d) Pemberdayaan kelembagaan yang berbasis gender.

i) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penekanan pada kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan keluarga, sehingga terwujud keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

- 1) Program Keluarga Berencana, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - (a) Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi
 - (b) Promosi pelayanan KHIBA.

- 2) Program Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Keluarga, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - (a) Penguatan kelembagaan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya).
 - (b) Penguatan Kelompok Panca Bina Keluarga.
- 3) Program promosi Kesehatan Ibu, bayi, anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - (a) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.

j) Kebudayaan

Kebijakan urusan kebudayaan diarahkan untuk pengembangan dan pengelolaan kekayaan/keanekaragaman budaya.

- 1) Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - (a) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya lokal.
 - (b) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya.
- 2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan indikasi kegiatan :
 - (a) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
 - (b) Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah.
 - (c) Pembinaan Penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - (d) Pengembangan Program Pengembangan Kehidupan Beragama.

k) Kepemudaan dan Olahraga

Sasaran kebijakan ini antara lain mengembangkan sarana prasarana keolahragaan dan pembinaan pemuda ke arah kemandirian dan terampil dan inovatif.

- 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - (a) Pendataan potensi kepemudaan.
 - (b) Pembinaan kepemudaan.

- 2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - (a) Pembinaan organisasi kepemudaan.
 - (b) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan.
- 3) Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup (*Life skill*) Pemuda, dengan indikasi kegiatan:
 - (a) Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan bagi pemuda.
 - (b) Perintisan dan pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP).
- 4) Program peningkatan Sarana Prasarana Olahraga, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - (a) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
 - (b) Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

1) Otonomi Desa, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Desa, Perangkat Desa

Sasaran kebijakan ini antara lain meningkatkan kinerja aparatur yang tangguh dan profesional, jujur, adil serta transparan.

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - (a) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
 - (b) Rapat umum dengar pendapat/dialog dan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat dan tokoh agama.
 - (c) Rapat-rapat BPD
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - (a) Pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan desa.
 - (b) Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.

- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - (a) Pendidikan dan pelatihan kapasitas manajemen pemerintahan desa.
 - (b) Seminar atau workshop peningkatan kinerja sumberdaya aparatur.
 - (c) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- 4) Program Koordinasi bidang Tata Kelola Pemerintahan, dengan indikasi kegiatan berupa :
 - (a) Koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
 - (b) Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
 - (c) Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD).
 - (d) Pelelangan/sewa pengelolaan tanah kas desa.

m) Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan pemberdayaan masyarakat antara lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memotivasi agar mampu berswasembada dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.

- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikasi kegiatan:
 - (a) Peningkatan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - (a) Pembinaan kelompok masyarakat (Pokmas) Pembangunan Desa.
 - (b) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Musrenbangdesa).
- 3) Program Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan, dengan indikasi kegiatan antara lain :

- (a) Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa.
 - (b) Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan.
 - (c) Pelatihan ketrampilan usaha-usaha ekonomi produktif.
- 4) Program Pengembangan Data, dengan indikasi kegiatan :
- (a) Pendataan dan pengolahan data profil desa/tingkat perkembangan desa.
 - (b) Pendataan dan pengisian data monografi desa.

n) Perpustakaan

Penekanan arah kebijakan ini antara lain mengembangkan sarana prasarana perpustakaan desa serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pembaca.

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan indikasi kegiatan :
- (a) Pengembangan minat dan budaya baca.
 - (b) Pengembangan SDM tenaga pengelola perpustakaan desa.

B. PROGRAM PELAYANAN LAINNYA

1. Pertanian

Penekanan kebijakan bidang pertanian menitikberatkan pada upaya pengembangan agribisnis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha serta produk pertanian.

- a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis.
 - 2) Peningkatan kemampuan lembaga petani.
 - 3) Pengembangan jaringan irigasi ditingkat usaha tani.
 - 4) Rehabilitasi jaringan irigasi.
- b) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pembangunan sarana prasarana pemasaran/promosi atas hasil produksi pertanian.

- 2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, dengan indikasi kegiatan :
 - (a) Penyuluhan penerapan teknologi pertanian tepat guna.
- c) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - 1) Pembentukan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);
 - 2) Pengembangan kapasitas Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan kelompok tani (Gapoktan).

BAB X

P E N U T U P

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai denganyang direncanakan.

Tim Penyusun

No	Uraian Kegiatan	Desa	Waktu	Terb. Administrasi							ACC	
03	Facilitas Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa Sukamaju	6 thn	Terb. Administrasi							40.000.000	✓
04	Registan Medial Korfiks Perawatan	Desa Sukamaju	6 thn	Tercapainya Kecepatan Medial							12.000.000	✓
05	Administrasi Pajis Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Sukamaju	6 thn	Terb. Administrasi PBB							12.000.000	✓
06	Penerbitan/Pengajuan Salsejabatik Tanah Kas Desa	Desa Sukamaju	6 thn	Terb. Administrasi							12.000.000	✓
JUMLAH PER BIDANG												
6.798.940.000												
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
1	Sub Bidang Pendidikan											
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/PA/TPQ/Madrasah NurFormal MIK Desa(Honor, Paluran dll)	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD							300.000.000	✓
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD dll)	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan Mutu Pendidikan							300.000.000	✓
03	Peningkatan dan pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan Penguasaan Masyarakat							60.000.000	✓
04	Pembelajaran sarana prasarana perpustakaan/halaman bacaan/sanggar belajar milik desa	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan sarana dan prasarana							60.000.000	✓
05	Pemeliharaan sarana prasarana PAUD/TK/PA/TPQ/AM/Arasah NurFormal MIK Desa	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan sarana pendidikan PAUD							300.000.000	✓
06	Pembangunan/Rehabilitasi/beningkasan/pengadaan sarana/prasarana di/smpa	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan fasilitas masyarakat							100.000.000	✓
07	Pengadaan perpustakaan milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan fasilitas masyarakat							30.000.000	✓
08	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan budaya	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan kegiatan sanggar seni							30.000.000	✓
09	Dukungan pendidikan bagi siswa MIK/NurFormal	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan pendidikan masyarakat							30.000.000	✓
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa/Polindes/MIK Desa/ obat, Inesent, KB, GAB)	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan Kesehatan Masyarakat							120.000.000	✓
02	Penyelenggaraan Posyandu (makan tambahan JG Bumi, Lunas, Inesent)	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan Fasilitas Posyandu							210.000.000	✓
03	Penyediaan Dan Pelelhan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan dll)	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat							50.000.000	✓
04	Penyelenggaraan desa elaga kesehatan	Desa Sukamaju	6 thn	Peningkatan Kesehatan Masyarakat							30.000.000	✓
2	Sub Bidang Kesehatan											

05	Pembinaan Pelang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	Desa Sukamaju	6 tm	Peningkatan kesehatan Remaja				✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	006	✓
06	Pengaturan bersama silek Bina Keluarga Baffa (BKB)	Desa Sukamaju	6 tm	Peningkatan Peningkatan Masyarakat				✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	008	✓
07	Pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan tradisional	Desa Sukamaju	6 tm	Peningkatan Peningkatan Masyarakat				✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	008	✓
08	Pembelajaran sarana prasarana PogramuPKdDesaPKD	Desa Sukamaju	6 tm	Peningkatan Fasilitas Pogramu				✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000	006	✓
09	Pengadaan sarana/ prasarana Pogramu	Desa Sukamaju	6 tm	Peningkatan fasilitas kesehatan				✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	009	✓
														1.812.000.000		
3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perawatan Ruang																
01	Pembelajaran jalan desa	Desa Sukamaju	3 tm	Memperancar transportasi				✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	009	✓
02	Pembelajaran jalan lingkungan permukiman/gang	Desa Sukamaju	4 tm	Memperancar transportasi				✓	✓	✓	✓	✓	✓	400.000.000	008	✓
03	Pembelajaran jalan usaha tani	Desa Sukamaju	3 tm	Memperancar transportasi				✓	✓	✓	✓	✓	✓	160.000.000	008	✓
04	Pembelajaran jembatan desa	Desa Sukamaju	3 tm	Memperancar transportasi				✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	006	✓
05	Pembelajaran prasarana jalan desa/gorong-gorong/banjir/pertanian/airase	Desa Sukamaju	3 tm	Memperancar saluran air				✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	006	✓
06	Pembelajaran gedung (resersewa) berdasarkan kemasyarakatan	Desa Sukamaju	3 tm	Peningkatan fasilitas pasar desa				✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	006	✓
07	Pembelajaran pemakalahibus berserlah/pelaksanaan mlk desa	Desa Sukamaju	3 tm	Tempel/serlah tempat makan				✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	006	✓
08	Pembelajaran rumah/pelaksanaan / belak desa	Desa Sukamaju	3 tm	Peningkatan fasilitas masyarakat				✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000	006	✓
09	Pembangunan jalan desa	Desa Sukamaju	4 tm	Memperancar transportasi				✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000.000	008	✓
10	Pembangunan jalan lingkungan	Desa Sukamaju	4 tm	Memperancar transportasi				✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000.000	008	✓
11	Pembangunan jalan usaha tani	Desa Sukamaju	3 tm	Memperancar transportasi				✓	✓	✓	✓	✓	✓	600.000.000	008	✓
12	Pembangunan jembatan mlk desa	Desa Sukamaju	3 tm	Memperancar transportasi				✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	008	✓
13	Pembangunan rehabilitasi/pertajalan/ prasarana jalan desa/gorong-gorong, seakan air	Desa Sukamaju	3 tm	memperancar saluran air				✓	✓	✓	✓	✓	✓	600.000.000	008	✓
14	Pembangunan rehabilitasi berdasarkan kemasyarakatan	Desa Sukamaju	3 tm	Meningkatkan fasilitas masyarakat				✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	008	✓
15	Pembangunan rehabilitasi/pertajalan pemukiman mlk desaditus berserlah mlk desa/pondokan	Desa Sukamaju	3 tm	Meningkatkan fasilitas tempat makan				✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000.000	008	✓
16	Pembelajaran pola wilayah dan sosial desa	Desa Sukamaju	3 tm	Peningkatan informasi Desa				✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000	008	✓
17	Pembangunan dokumen perencanaan tata ruang desa	Desa Sukamaju	4 tm	Peningkatan informasi Desa				✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	008	✓

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RPJMDesa 2021 - 2027

DESA :

KECAMATAN :

TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.		Kepala Desa	
2.	<i>Suhad</i>	Sekretaris Desa
3.		Kaur Keuangan	
4.		Kaur Perencanaan	
5.		Kaur Tata Usaha dan Umum	
6.		Kasi Pemerintahan	
7.		Kasi Pelayanan	
8.		Kasi Kesejahteraan	
9.	<i>Suparman</i>	Ketua LPMD	

10.		Anggota LPMD	
11.		Ketua PKK.	
12.		Ketua Karang Taruna	
13.		Ketua RW....	
14.		Ketua RW	
15.		Ketua RW	
16.		Ketua RW	
17.		Ketua RW	
18.		Ketua RW	
19.		Ketua RW	
20.		Ketua RW	
21.			
22.			
23.			
24.			

25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			

BPD DESA SUKAMAJU

Sekretaris,

(.....)

NOTULENSI

ACARA : PEMBAHASAN RPJMDesa 2021 - 2027

DESA :

KECAMATAN :

TANGGAL :

BPD DESA SUKAMAJU

Sekretaris,

(.....)